

**Judul** : Pemerintah Diminta Serious Soal Ibu Kota Negara  
**Tanggal** : Jumat, 07 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 4

## Pemerintah Diminta Serious Soal Ibu Kota Negara

[JAKARTA] Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung wacana pemerintah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Tak ada lagi alasan untuk tidak memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta dengan kondisi saat ini seperti macet, banjir, dan tingginya permasalahan sosial.

“Negara lain juga lakukan pemindahan ibu kota. Pemindahan ibukota negara itu sudah menjadi kebutuhan saat ini. Kita harus sekarang lakukan, kalau tidak, bisa dibayangkan sekarang saja kondisi Jakarta sudah seperti ini, apalagi kalau 5-10 tahun yang akan datang,” ujar Zainudin Amali, Rabu (5/7).

Menurut Zainudin, saat presiden menyampaikan akan menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempelajari pemindahan ibu kota dirinya langsung mendukung. Permasalahan Jakarta sudah sangat kompleks sehingga tak ada cara lain selain memindahkan ibu kota negara ke daerah lain yang lebih representatif.

Soal lokasinya, politisi Golkar ini menyerahkan sepenuhnya kepada Bappenas untuk mengkaji yang layak dijadikan pusat ibu kota. Nantinya, lanjut dia, DKI dikhususkan untuk pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis.

Dengan pemindahan ibu kota, ka-



Bambang Brojonegoro

DOK SP

ta Zainudin, semua instansi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif juga akan dipindahkan. Sebab, aktivitas pemerintahan akan berjalan efektif karena terpusat pada satu tempat.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto berharap, pemindahan ibukota memberikan hasil yang lebih baik. Sebab, menurutnya, wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama terdengar, bahkan dari zaman Presiden pertama RI Soekarno.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak usah gembar-gembor soal pemindahan ibu kota

sebelum ada pengkajian yang jelas. Hal itu perlu biaya besar dan perencanaan yang matang sebelum memindahkan ibu kota. “Tempat yang harus dibicarakan secara serius, karena ini bukan sekedar omongan. Sebaiknya pemerintah merencanakan ini dengan matang,” katanya.

Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memperkirakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain memakan waktu minimal lima tahun. Namun, pemerintah mengupayakan agar kajian pemindahan ibu kota rampung pada akhir 2017 ini.

Bambang memastikan bahwa lokasi Ibukota yang baru itu berada di luar Pulau Jawa. Ia menyebut hingga kini pemerintah masih mencari daerah yang tepat.

Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan pemindahan tersebut membutuhkan waktu lama untuk di-realisasikan.

Kempupera baru bisa bekerja membuat rencana tata kota setelah Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memaparkan rencana pemindahan ibu kota sekembalinya dari mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Turki dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg, Jerman. [H-14/N-8]